



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

JUDUL ARTIKEL (Maksimal 15 Kata dengan menggunakan format tulisan Center, Uppercase, Font: Book Antiqua, Line Spacing: 1 cm, After: 8 pt, Size: 15

TITLE (No more than 15 words, Center, Capitalize Each Word, Font: Book Antiqua, Linespacing: 1 cm, After: 8 pt, Size: 15 pt)

Moh. Annand Ananda Saputra
(Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia)

anankadelang@gmail.com
082146020109

Naskah Diterima Xx xxxxxx xxxx	Revisi Xx xxxxxx xxxx	Diterima xx xxxxxx xxxx
-----------------------------------	--------------------------	----------------------------

Abstract

Penelitian ini menyoroti peran penting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia dalam memastikan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan tujuan nasional. BPK berfungsi sebagai lembaga independen yang melakukan pemeriksaan keuangan negara secara mandiri dan objektif, dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan analisis deskriptif dan interpretasi sistematis terhadap data dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPK memiliki kewenangan yang luas dalam pemeriksaan keuangan negara, namun menghadapi hambatan seperti transparansi internal yang masih perlu ditingkatkan dan pengawasan internal yang tumpang tindih. Ditutup dengan solusi untuk BPK agar dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara lebih efektif, seperti penguatan internal BPK, penyusunan panduan untuk laporan temuan, dan penyesuaian struktur birokrasi untuk menghindari tumpang tindih dengan pengawasan internal pemerintahan.

Keywords: BPK, Pengelolaan Keuangan Negara, Hambatan

Abstrak

Penelitian ini menyoroti penggunaan dana APBN untuk proyek strategis nasional di ibu kota negara (IKN). Ide pemerintah pemindahan IKN selama ini menjadi polemik pro dan kontra lantaran secara sepihak pemerintah memindahkan IKN dengan alasan kepadatan penduduk, permukaan tanah di Jakarta semakin hari semakin menurun, dan juga rawan banjir. Pemerintah mengeluarkan kebijakan efisiensi yang mengakibatkan pembangunan IKN mangkrak karena kekurangan dana. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan analisis secara deskriptif terhadap studi dalam pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ide pemindahan IKN dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil menghasilkan makrak dana APBN tidak mampu menutupi tata kelola pemerintahan di tambah dengan infrastruktur di IKN. Pemerintah belum mampu mencerminkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) mulai dari proses perencanaan dalam pembangunan di IKN.

Kata Kunci: Dana APBN dan Proyek Nasional IKN.

Abstract:

This research highlights the use of state budget funds for national strategic projects in the national capital (IKN). The government's idea of moving the national capital has been a polemic of pros and cons because the government unilaterally moved the national capital on the grounds of population density, land surface in Jakarta is decreasing day by day, and also prone to flooding. The government issued an efficiency policy which resulted in the construction of IKN stalled due to lack of funds. The research method used is normative juridical analysis with a descriptive analysis approach to studies in the literature. The results of this study indicate that the idea of moving IKN in an unstable economic situation resulted in the macro of APBN funds not being able to cover governance in addition to infrastructure in IKN. The government has not been able to reflect the implementation of good governance starting from the planning process in the development of IKN.

Keywords: APBN Funds and IKN National Project.

Daftar Isi

Abstrak	1
Daftar Isi	3
Pendahuluan	4
Latar Belakang	4
Perumusan Masalah	6
Metode Penelitian	7
Pembahasan	7
Sub Tema	7
Sub Tema	17
Sub Tema	22
Kesimpulan	32
Daftar Pustaka	33



Copyright © YEAR by Author(s)

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Left it bla

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagian latar belakang mengurai mengenai hal-hal yang menjadi alasan-alasan sehingga dipandang penting sehingga dilakukannya penelitian, analisis/tinjauan hukum tata negara/hukum administrasi negara yang relevan, kajian teori, studi kepustakaan atau gagasan kritis konseptual yang akan disajikan di dalam jurnal ini.

Ulasan diketik dengan menggunakan Book Antiqua, ukuran Font 12 dengan spasi 1,15, paragraph dengan bentuk menjorok 1 tab, pengutipan/sitasi dilakukan dalam bentuk catatan kaki/footnote dengan format *The Chicago Manual of Style (Fullnote)* dapat menggunakan aplikasi mendeley, zotero, Endnote. Penulis *wajib* menggunakan 15 referensi dapat termuat atas :

1. **Jurnal**, setidaknya dalam 5 tahun terakhir;¹
2. **Buku**, penulis diberikan kebebasan terkait tahun terbitan selama masih relevan;²
3. **Prosiding**;³
4. **Tesis**;⁴

¹ Pan Mohamad Faiz, "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Prespektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): h.766, <https://doi.org/10.31076/jk1344>. *Satu penulis

Utia Meylina Rudy dan Rifandy Ritunga, "From State Sovereignty To People Sovereignty: A Case Study of Indonesia's Constitutional Court," *Journal Legal, Ethical and Regulatory Issue* 24, no. 7 (2021): h.7, <https://doi.org/xx.xxxxx/xxxxxxx>. *Dua penulis

Rachmi Handayani, I Gusti Ayu Ketut, Lintje Anna Marpuang, Guntur Hamzah, Yuliandri Yuliandri, dan Anis Mashdurohatun, "Empowerment Community Leaders as to Strengthen the Implementation of Regional Autonomy," *Journal of Politics and Law* 10, no. 5 (2017), <https://doi.org/10.5539/jpl.v10n5p29> atau dapat ditulis seperti Rachmi Handayani, dkk, "Empowerment Community Leaders as to Strengthen the Implementation of Regional Autonomy," *Journal of Politics and Law* 10, no. 5 (2017), <https://doi.org/10.5539/jpl.v10n5p29>. *Diatas dua penulis

² Jimly Asshiddiqie, dan Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h.120.

Bagir Manan, dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1993), h.130.

³ Juhana Ujuh, dan Taufik Deden, "Kedudukan Dan Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana Pemilu." In *Seminar Nasional & Call For Paper "Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokratisasi Indonesia Yang Berintegritas "*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018, h.28

Ni'matul Huda, "Dinamika Hubungan Kewenangan Pusat & Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah", *Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers Kenegaraan Titik Taut Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, Indonesia, Juni 2021, h.19, <https://law.uui.ac.id/prosiding-seminar-nasional-call-for-papers-kenegaraan/>

⁴ Freddy Harris, "Kedudukan Negara Sebagai Penyerta Modal Dalam PT Persero: Pengubahan Ketentuan Yang Tidak Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Hukum Perusahaan", Disertasi, Universitas Indonesia, 2007, h.19, https://pdrh.law.ui.ac.id/download/unduh/Draft_Katalog_Disertasi_FHUI_1987-2017_Berdasarkan_Tahun_Terbit.pdf?id=uniqueid.

Moh. Mahfud MD, "Separation of Powers and Independence of Constitutional Court in Indonesia," *Paper Presented at the 2nd Congress of the World Conference on Constitutional Justice*, Rio de Janeiro, Brazil, 16-18 January 2011..

5. **Internet**, tahun terbitan dibebaskan selama bukan berasal dari blogspot, wordpress, atau wikipedia;⁵
6. Serta sumber referensi terkait lainnya.

B. Perumusan Masalah

Pada bagian ini dimuat rumusan masalah yang disusun dalam bentuk pertanyaan atau paragraf. Rumusan masalah ini yang kemudian menjadi alur pemikiran yang akan dibahas di dalam bagian selanjutnya.

C. Metode Penelitian⁶

Penelitian ini secara khusus memusatkan fokusnya pada studi kasus Putusan Nomor 41/G/LH/2018/PTUN.PBR. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif.

II. PEMBAHASAN

Bagian ini menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan metode analisis yang digunakan. Penulisan hasil dan pembahasan dapat ditambahkan dengan grafik, tabel, atau gambar yang mendukung. Sistematika hasil dan pembahasan harus merujuk pada rumusan masalah penelitian. Penulisan dapat dibuat dengan format subjudul berdasarkan permasalahan yang dibahas.

A. Sub-Topik hasil pembahasan

Judul sub-topik merupakan uraian dari pokok pembahasan yang akan dibahas dalam artikel ini dengan batasan telah ditentukan sesuai rumusan masalah. Dapat termuat secara deskripsi, jika diperlukan penulis bisa mencantumkan data pendukung seperti tabel, gambar dan sebagainya dengan resolusi yang jelas dan mudah terbaca.

B. Sub-Topik hasil pembahasan

Judul sub-topik merupakan uraian dari pokok pembahasan yang akan dibahas dalam artikel ini dengan batasan telah ditentukan sesuai rumusan masalah. Dapat termuat secara deskripsi, jika diperlukan penulis bisa mencantumkan data pendukung seperti tabel, gambar dan sebagainya dengan resolusi yang jelas dan mudah terbaca.

⁵ Andrian Pratama Taher, *Pemerintah Ubah Istilah Social Distancing Jadi Physical Distancing*, Tirto.id, 2020, <https://tirto.id/pemerintah-ubah-istilah-social-distancing-jadi-physical-distancing-eG8j>.

⁶ Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian. Kajian konseptual tidak perlu metode penelitian.

III. KESIMPULAN

Bagian ini memuat kesimpulan yang diperoleh dalam bentuk uraian paragraf dengan mengacu pada rumusan masalah. Penulisan kesimpulan tidak menggunakan penomoran atau *bullet points*, tetapi berupa narasi dalam bentuk paragraf.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun dengan menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley, EndNote atau Zotero dengan format *The Chicago Manual of Style* yang dikategorisasi berdasarkan jenis sumber berupa buku, jurnal, makalah, karangan esai dalam buku kumpulan tulisan, dan internet. Sumber disusun berdasarkan abjad dalam setiap kategorinya.

Jurnal

- Faiz, Pan Mohamad. "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Prespektif Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 766-787, <https://doi.org/10.31076/jk1344>.
- Rudy, Utia Meylina, dan Rifandy Ritunga, "From State Sovereignty To People Sovereignty: A Case Study of Indonesia's Constitutional Court". *Journal Legal, Ethical and Regulatory Issue* 24, no. 7 (2021): 1-13, <https://doi.org/xx.xxxxx/xxxxxxx>.
- Handayani, Rachmi, I Gusti Ayu Ketut, Lintje Anna Marpuang, Guntur Hamzah, Yuliandri Yuliandri, dan Anis Mashdurohatun. "Empowerment Community Leaders as to Strengthen the Implementation of Regional Autonomy". *Journal of Politics and Law* 10, no. 5 (2017): 29-34, <https://doi.org/10.5539/jpl.v10n5p29> atau dapat ditulis seperti Handayani, Rachmi, dkk. "Empowerment Community Leaders as to Strengthen the Implementation of Regional Autonomy". *Journal of Politics and Law* 10, no. 5 (2017): 29-34, <https://doi.org/10.5539/jpl.v10n5p29>.

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, dan Muchamad Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1993.

Prosiding

- Ujuh, Juhana, dan Taufik Deden. "Kedudukan Dan Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana Pemilu." In *Seminar Nasional & Call For Paper "Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokratisasi Indonesia Yang Berintegritas "*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018.
- Huda, Ni'matul. "Dinamika Hubungan Kewenangan Pusat & Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah". *Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers Kenegaraan Titik Taut Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta, Indonesia, Juni 2021, <https://law.uui.ac.id/prosidung-seminar-nasional-call-for-papers-kenegaraan/>.

Skripsi/Tesis/Disertasi/Makalah

- Harris, Freddy. "Kedudukan Negara Sebagai Penyerta Modal Dalam PT Persero: Pengubahan Ketentuan Yang Tidak Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Hukum Perusahaan". *Disertasi*, Universitas Indonesia, 2007. [https://pdrh.law.ui.ac.id/download/unduh/Draft Katalog Disertasi FHUI 1987-2017 Berdasarkan Tahun Terbit.pdf?id=uniqueid](https://pdrh.law.ui.ac.id/download/unduh/Draft_Katalog_Disertasi_FHUI_1987-2017_Berdasarkan_Tahun_Terbit.pdf?id=uniqueid).
- MD, Moh. Mahfud. "Separation of Powers and Independence of Constitutional Court in Indonesia". *Paper Presented at the 2nd Congress of the World Conference on Constitutional Justice*. Rio de Janeiro, Brazil, 16 Januari -18 Januari 2011.

Internet

- Taher, Andrian Pratama. *Pemerintah Ubah Istilah Social Distancing Jadi Physical Distancing*. Tirta.id. 2020. <https://tirta.id/pemerintah-ubah-istilah-social-distancing-jadi-physical-distancing-eG8j>.

ADAGIUM HUKUM

Penulis dapat merekomendasikan penggunaan adagium hukum, namun hal ini sifatnya fleksibel/tidak pasti. Artikel diberikan adagium apabila jumlah halaman keseluruhan berjumlah ganjil.

Adagium Hukum dapat disertakan menggunakan Bahasa Inggris maupun Bahasa Latin), disertai artinya.

Catatan:

Sehubungan dengan perubahan format Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (JAPHTN-HAN), maka ada beberapa catatan untuk penulis:

1. Tiap naskah **diwajibkan menggunakan aplikasi pengutipan standar Mendeley**
2. Pengutipan menggunakan *footnote*
3. **Referensi dicantumkan di file naskah terpisah dalam format Chicago Manual Style** (detail, silakan cek Referencing Model Chicago Manual Style)
4. **Manuskrip sekurang-kurangnya 4000 kata**
5. Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris yang baku meliputi: tujuan penelitian, masalah yang dibahas, metode, hasil, kesimpulan (**maksimal 250 kata**)
6. Abstrak tidak boleh terdapat kutipan apapun (should be stand-alone)
7. Manuskrip wajib mengikuti format yang tersedia
8. Penulis **dilarang menambahkan penulis setelah naskah diterima untuk dipublikasikan**
9. Guna memastikan kolaborasi internasional dan cakupan perspektif yang lebih luas, maka tiap naskah **hanya boleh ditulis maksimal 5 (lima) orang penulis dan satu atau lebih berasal dari afiliasi institusi luar Indonesia**. Referensi yang digunakan **wajib minimal 15 artikel jurnal (nasional atau internasional) yang terbaru (5 tahun terakhir)**
10. Setiap **artikel jurnal yang dikutip, dalam bagian Referensi wajib menyertakan DOI atau Link artikel secara langsung**
11. Kesimpulan, ditulis secara singkat, tepat dan padat, **tidak boleh lebih dari satu paragraf dan harus menjawab rumusan masalah yang dibahas**. Bagian ini tidak diperkenankan terdapat kutipan, dan dilarang menulis ulang/copy paste kalimat atau penjelasan yang sudah ditulis di bagian isi. Penulis harus benar-benar menuliskan kesimpulan dengan bahasa diksi yang baru.
12. Penulisan undang-undang/aturan hukum di Indonesia wajib menyertakan informasi perihal Nomor Lembaran Negara dan menyertakan link UU tersebut, sementara untuk aturan Internasional juga wajib menyertakan link peraturan tersebut yang bisa dilacak secara langsung.